



BUPATI KONAWE UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA  
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT  
DI KABUPATEN KONAWE UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Konawe Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Nomor 5494)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 123);
11. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 154).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN KONAWE UTARA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan Masyarakat.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kasatpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Utara.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Seketris Daerah.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
9. Lurah adalah Pimpinan Kelurahan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kepala Desa adalah kepala pemerintah desa/desa adat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
12. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan Negara.

13. Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman, baik fisik maupun psikologis.
14. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimanis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tertib, dan teratur.
15. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa diangkat oleh Lurah dan/atau Kepala Desa untuk melaksanakan pelindungan Masyarakat.
16. Kepala Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala Satlinmas adalah Kepala Desa/Lurah yang memimpin penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Desa/Kelurahan.
17. Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Anggota Satlinmas adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan bersedia untuk menjadi Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat.
18. Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat yang dibentuk, dan dipilih secara selektif yang berkedudukan di Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan pelindungan masyarakat di Daerah.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Maksud disusunannya Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. memberikan pedoman dalam penyelenggaraan Linmas di Daerah; dan
  - b. memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Linmas.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. mewujudkan budaya tertib, teratur, dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat; dan
  - b. memberikan rasa aman, tenteram, dan nyaman pada masyarakat.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. penyelenggaraan Linmas;
- b. perekrutan, pembentukan regu, masa keanggotaan, dan pemberdayaan;
- c. tugas, hak, dan kewajiban;
- d. pelaporan; dan
- e. pendanaan.

BAB III  
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten, Kecamatan  
dan Kelurahan

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Linmas di Daerah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/lurah.

Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibentuk :
  - a. Satgas Linmas Kabupaten;
  - b. Satgas Linmas Kecamatan; dan
  - c. Satlinmas Kelurahan.
- (2) Satgas Linmas Kabupaten dan Satgas Linmas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Satgas Linmas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lurah.

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi Satgas Linmas Kabupaten dan Satgas Linmas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, terdiri dari :
  - a. kepala Satgas Linmas; dan
  - b. anggota Satgas Linmas.
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk:
  - a. Kepala Satgas Linmas Kabupaten dijabat oleh Pejabat Administrator pada Satpol PP yang membidangi Linmas; dan
  - b. Kepala Satgas Linmas Kecamatan dijabat oleh Pejabat Pengawas pada Kecamatan yang membidangi ketenteraman dan ketertiban.
- (3) Keanggotaan Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk:
  - a. Anggota Satgas Linmas Kabupaten adalah Aparatur Linmas pada Perangkat Daerah dan Anggota Satlinmas yang dipilih secara selektif; dan
  - b. Anggota Satgas Linmas Kecamatan adalah Aparatur Linmas pada Kecamatan dan Anggota Satlinmas yang dipilih secara selektif.

- (4) Keanggotaan Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi kedalam 3 (tiga) bidang sebagai berikut :
  - a. bidang pembinaan;
  - b. bidang peningkatan kapasitas; dan
  - c. bidang pencegahan dan penanganan bencana.
- (5) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit berjumlah 10 (sepuluh) orang.
- (6) Penentuan jumlah Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan, kondisi wilayah, dan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (7) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :
  - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
  - b. membantu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum masyarakat;
  - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
  - d. melaksanakan tugas lain dalam rangka penyelenggaraan Linmas yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
- (8) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Satgas Linmas dapat melibatkan Satlinmas.
- (9) Struktur Organisasi Satgas Linmas Kabupaten dan Satgas Linmas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) Struktur Organisasi Satlinmas Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri dari :
  - a. kepala Satlinmas;
  - b. kepala pelaksana;
  - c. komandan regu; dan
  - d. anggota.
- (2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Lurah.
- (3) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh Pejabat Pengawas yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum, dan Linmas di Kelurahan, atau personil di Kelurahan yang dianggap cakap dan mampu menjalankan tugas sebagai Kepala Pelaksana.
- (4) Komandan Regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditunjuk oleh Kepala Satlinmas dari Anggota Satlinmas atas usulan Kepala Pelaksana.
- (5) Keanggotaan Satlinmas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang setiap regu.
- (6) Penentuan jumlah Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan memperhatikan keterwakilan setiap RT/RW dan Linmas perempuan, memperhatikan kondisi wilayah, dan kemampuan keuangan Kelurahan.
- (7) Struktur Organisasi Satlinmas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Desa

Pasal 8

Penyelenggaraan Linmas di Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Linmas di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan dengan membentuk Satlinmas Desa.
- (2) Satlinmas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Struktur Organisasi Satlinmas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari :
  - a. kepala Satlinmas;
  - b. kepala pelaksana;
  - c. komandan regu; dan
  - d. anggota.
- (2) Kepala Satlinmas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa.
- (3) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh Perangkat Desa yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, atau personil di Pemerintahan Desa yang dianggap cakap dan mampu menjalankan tugas sebagai Kepala Pelaksana.
- (4) Komandan Regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditunjuk oleh Kepala Satlinmas atas usulan Kepala Pelaksana.
- (5) Keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang setiap regu.
- (6) Penentuan jumlah Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan memperhatikan keterwakilan setiap RT/RW dan Linmas perempuan, memperhatikan kondisi wilayah, dan kemampuan keuangan Desa.
- (7) Struktur Organisasi Satlinmas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEREKRUTAN, PEMBENTUKAN REGU, MASA KEANGGOTAAN, DAN  
PENBERDAYAAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT  
DESA/KELURAHAN

Bagian Kesatu  
Perekrutan

Pasal 11

- (1) Kepala Desa/Lurah selaku Kepala Satlinmas melaksanakan perekrutan calon Anggota Satlinmas Desa/Kelurahan.

- (2) Perekrutan calon Anggota Satlinmas Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terbuka bagi seluruh warga masyarakat yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi.

#### Pasal 12

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meliputi:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
- f. jejang pendidikan paling rendah lulusan Sekolah Dasar (SD) dan/atau sederajat serta utamakan lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau yang sederajat ke atas;
- g. bersedia membuat pernyataan menjadi Anggota Linmas secara sukarela dan berperan aktif dalam kegiatan Linmas; dan
- h. bertempat tinggal dan memiliki Kartu Tanda Penduduk di Desa/Kelurahan setempat.

#### Pasal 13

- (1) Seleksi calon Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) terdiri dari seleksi pengetahuan umum dan seleksi fisik.
- (2) Seleksi calon Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka dan transparan.

#### Pasal 14

- (1) Calon Anggota Satlinmas Desa/Kelurahan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan dinyatakan lolos seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diangkat menjadi Anggota Satlinmas Desa/Kelurahan.
- (2) Pengangkatan menjadi Anggota Satlinmas Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan untuk Kelurahan ditetapkan dengan keputusan Camat atas nama Bupati.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala Desa/Lurah kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Anggota Satlinmas yang telah diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikukuhkan oleh Bupati.
- (5) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Bupati dapat menugaskan Kasatpol PP atau perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat Desa untuk mengukuhkan Satlinmas.

- (7) Sebelum dilakukan pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Anggota Satlinmas mengucapkan janji Satlinmas secara bersama-sama dengan Naskah Janji sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Pembentukan Regu

### Pasal 15

- (1) Kepala Satlinmas Desa/Kelurahan membentuk regu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Desa/Kelurahan.
- (2) Regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini; dan
  - b. regu pengamanan.
- (3) Selain regu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk regu penanggulangan bencana yang bersifat *ad hoc* meliputi :
  - a. regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran;
  - b. regu penyelamatan dan evakuasi; dan/atau
  - c. regu dapur umum.

### Pasal 16

Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, bertugas:

- a. membantu melakukan upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman bencana, ketahanan negara, serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. membantu menginformasikan dan melaporkan situasi yang dianggap berpotensi bencana, mengganggu stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan
- c. membantu mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana, gangguan stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum masyarakat.

### Pasal 17

Regu Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf b, bertugas:

- a. membantu melakukan pemantauan terhadap ancaman konflik sosial dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- b. membantu melakukan pendataan dan melaporkan jumlah kerugian materi akibat bencana, kebakaran dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

### Pasal 18

Regu Pertolongan Pertama pada Korban Bencana dan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, bertugas membantu pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan kebakaran.

## Pasal 19

Regu Penyelamatan dan Evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b, bertugas:

- a. membantu evakuasi korban akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana;
- b. membantu melakukan pengamanan evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- c. membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi, dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

## Pasal 20

Regu Dapur Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c, bertugas:

- a. membantu mendirikan tempat penampungan sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana, kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- b. membantu mendirikan dapur umum sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

## Bagian Ketiga Masa Keanggotaan

### Pasal 21

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas Desa/Kelurahan berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Dalam hal keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun, tetapi mempunyai dedikasi dan kinerja yang baik, serta masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat diperpanjang sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Perpanjangan masa keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa bagi Satlinmas Desa dan Keputusan Lurah bagi Satlinmas Kelurahan.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - c. pindah tempat tinggal;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
  - e. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - f. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan/atau janji sebagai anggota Satlinmas; dan
  - g. menjadi pengurus partai politik.
- (5) Pemberhentian Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa bagi Satlinmas Desa dan Keputusan Lurah bagi Satlinmas Kelurahan.

- (6) Kepala Desa/Lurah menyampaikan keputusan perpanjangan keanggotaan Satlinmas atau keputusan pemberhentian keanggotaan Satlinmas kepada Kasatpol PP melalui Camat.

Bagian Keempat  
Pemberdayaan

Pasal 22

- (1) Pemberdayaan Satlinmas dilaksanakan untuk meningkatkan peran dan eksistensi Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan antara lain melalui:
- lomba sistem keamanan lingkungan;
  - jambore Satlinmas; dan
  - pos komando Satlinmas.
- (3) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Bupati.

BAB V  
TUGAS, HAK, DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu  
Tugas

Pasal 23

- (1) Satlinmas Desa/Kelurahan bertugas:
- membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum, dan Linmas dalam skala kewenangan Desa/Kelurahan;
  - membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum, dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum di Desa/Kelurahan;
  - membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran di Desa/Kelurahan;
  - membantu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum masyarakat di Desa/Kelurahan;
  - membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan di Desa/Kelurahan;
  - membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di Desa/Kelurahan;
  - membantu upaya pertahanan negara di Desa/Kelurahan;
  - membantu pengamanan objek vital di Desa/Kelurahan;
  - melaksanakan tugas lain dalam rangka penyelenggaraan Linmas yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satlinmas Desa mendapat tugas tambahan antara lain:
- lomba sistem keamanan lingkungan;
  - membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum, dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; dan
  - membantu Kepala Desa dalam penegakan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
- (3) Teknis pelaksanaan tugas Satlinmas Desa/Kelurahan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Hak

#### Pasal 24

Satlinmas Desa/Kelurahan berhak:

- a. mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas;
- b. mendapatkan kartu tanda Anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas;
- d. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun dari Bupati, serta 30 (tiga puluh) tahun dari Gubernur; dan
- e. mendapatkan honorarium dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.

#### Pasal 25

- (1) Peningkatan kapasitas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dapat diberikan melalui pelatihan.
- (2) Dalam pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa/Lurah dapat bekerjasama dengan TNI/Polri yang bertugas di Desa/Kelurahan setempat atau dengan instansi/lembaga yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas Linmas.
- (3) TNI/Polri sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas Linmas di instansi/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Hak

#### Pasal 24

Satlinmas Desa/Kelurahan berhak:

- a. mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas;
- b. mendapatkan kartu tanda Anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas;
- d. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun dari Bupati, serta 30 (tiga puluh) tahun dari Gubernur; dan
- e. mendapatkan honorarium dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.

## Pasal 25

- (1) Peningkatan kapasitas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dapat diberikan melalui pelatihan.
- (2) Dalam pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa/Lurah dapat bekerjasama dengan TNI/Polri yang bertugas di Desa/Kelurahan setempat atau dengan instansi/lembaga yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas Linmas.
- (3) TNI/Polri sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas Linmas di instansi/lembaga ssebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 26

Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, dapat diberikan setiap tahun pada peringatan hari ulang tahun Satlinmas dan/atau kegiatan Linmas lainnya.

## Pasal 27

Pemenuhan Hak Anggota Satlinmas Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah atau keuangan Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Kewajiban

## Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Satlinmas Desa/Kelurahan wajib:

- a. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. melaksanakan janji Satlinmas; dan
- c. melaporkan kepada Kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat serta Linmas.

## BAB VI

### PEMBINAAN

## Pasal 29

Pembinaan penyelenggaraan Linmas dilakukan pada:

- a. Linmas di Daerah;
- b. Linmas di Desa/Kelurahan; dan
- c. teknis operasional penyelenggaraan Linmas.

### Pasal 30

- (1) Pembinaan Linmas di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dilaksanakan oleh Kasatpol PP dan Kepala Perangkat Daerah yang mendampingi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan Linmas;
  - b. peningkatan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pelaksanaan kebijakan dalam pembinaan penyelenggaraan Linmas;
  - d. pelaksanaan koordinasi di bidang penyelenggaraan Linmas; dan
  - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Penyelenggaraan Linmas.

### Pasal 31

- (1) Pembinaan Linmas di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilaksanakan oleh Camat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional penyelenggaraan Linmas tingkat Kecamatan;
  - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Kecamatan;
  - c. pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas dan peningkatan kapasitas tingkat Kecamatan; dan
  - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penyelenggaraan Linmas tingkat Kecamatan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Pejabat Pengawas yang membidangi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan.

### Pasal 32

- (1) Pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional penyelenggaraan Linmas tingkat Desa/Kelurahan;
  - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Desa/Kelurahan;
  - c. pelaksanaan perekrutan dan pengerahan di bidang Linmas tingkat Desa/Kelurahan;
  - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penyelenggaraan Linmas tingkat Desa/Kelurahan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PELAPORAN

### Pasal 33

- (1) Pelaporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Desa berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dengan profil Desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 34

- (1) Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Bupati melalui Kasatpol PP dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa menyediakan dana dalam penyelenggaraan Linmas.
- (2) Penyediaan dana penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
  - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan
  - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa yang mengatur mengenai Linmas harus disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini, paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.


BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

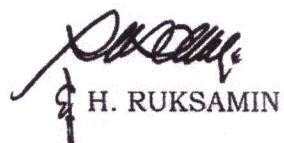
Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu  
Pada Tanggal 24 Mei 2023

 BUPATI KONAWE UTARA,

  
H. RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu  
Pada Tanggal 24 Mei 2023

 SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONWE UTARA,

  
H. M. KASIM PAGALA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2023 NOMOR 533

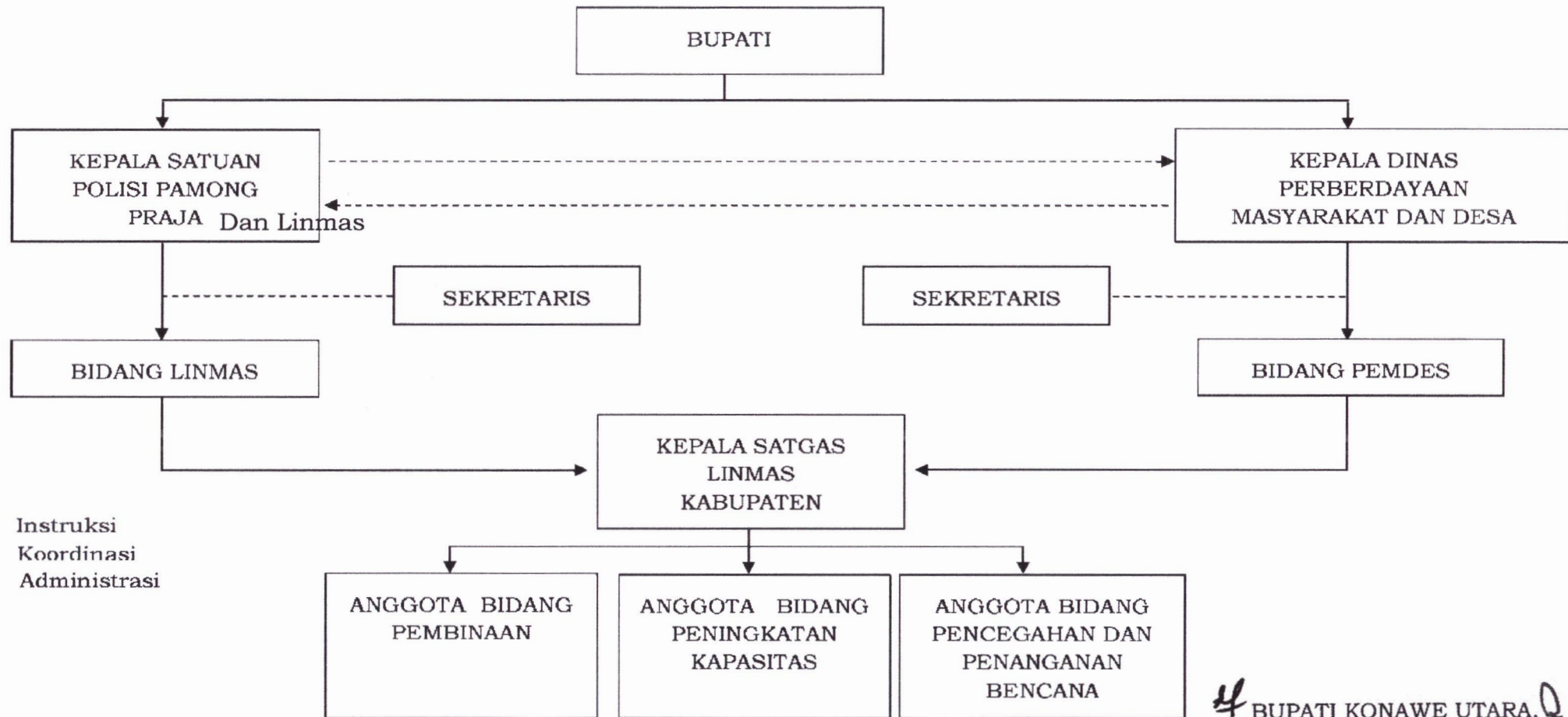
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 15 TAHUN 2023

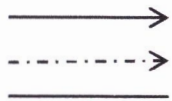
TANGGAL : 24 Mei 2023

TENTANG : PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN KONAWE UTARA.

STRUKTUR ORGANISASI SATGAS SATLINMAS KABUPATEN KONAWE UTARA



Keterangan



Instruksi  
Administrasi

Koordinasi

BUPATI KONAWE UTARA,

H. RUKSAMIN

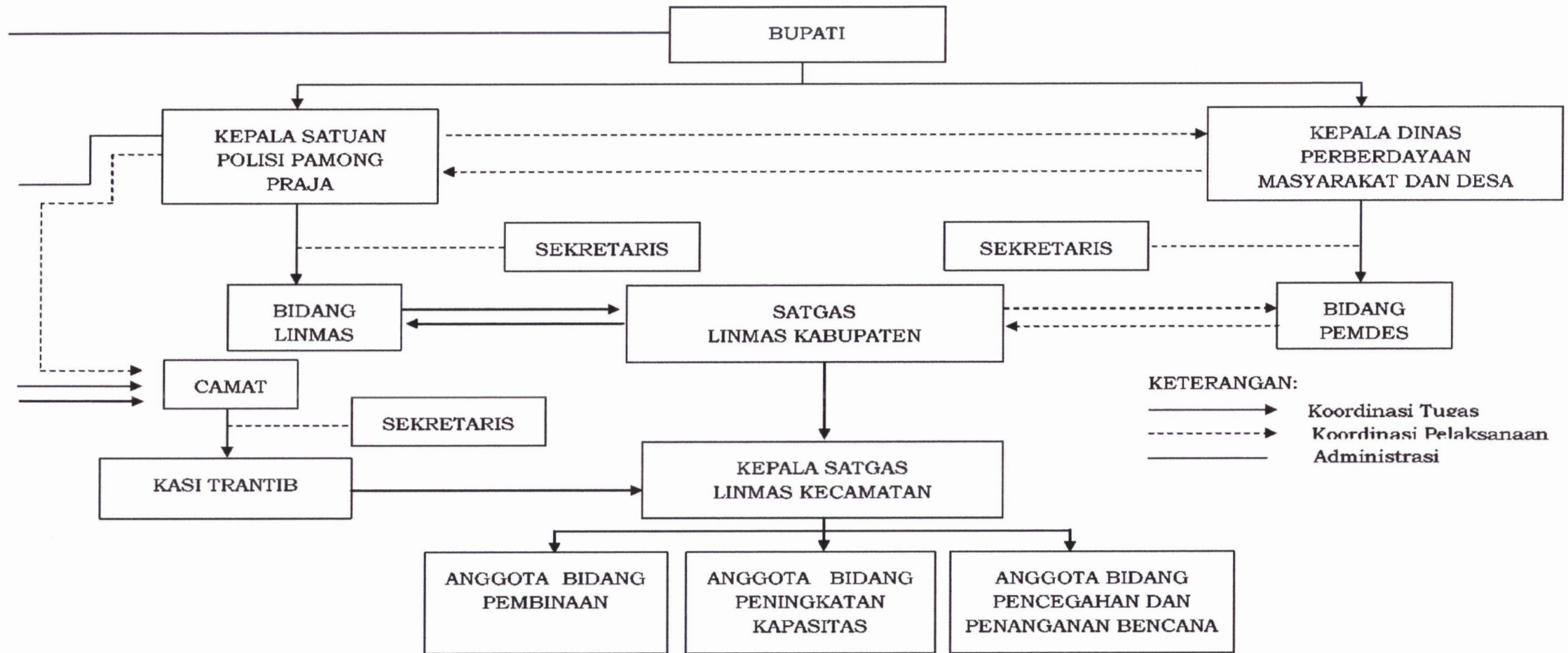
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 19 TAHUN 2023

TANGGAL : 24 MEI 2023

TENTANG : PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN KONAWE UTARA

STRUKTUR ORGANISASI SATGAS SATLINMAS KECAMATAN



BUPATI KONAWE UTARA,

H. RUKSAMIN

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 15 TAHUN 2023

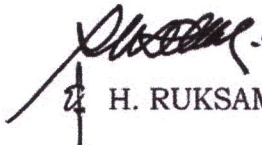
TANGGAL : 24 MEI 2023

TENTANG : PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN KONAWE UTARA.

NASKAH JANJI SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

1. Kami Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berazaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan pelindungan kepada masyarakat dan melakukan pembelaan Negara.
2. Kami Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu pemerintah dan pemerintahan daerah dalam meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketenteraman, serta ketertiban masyarakat
3. Kami Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi dan golongan dengan memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku.

H BUPATI KONAWE UTARA,

  
H. RUKSAMIN